

**PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA
DI KALIMANTAN BARAT**

Melati Pramudita Lestari¹

Merry Triani²

Yohanes Adi Nugroho³

Fiorintari Fiorintari⁴

Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Pontianak¹²³⁴

E-mail: pramumelati@gmail.com¹; merrytriani01@yahoo.com²; yohanesadi.nu@gmail.com³; Fiorintari@gmail.com⁴

ABSTRACT

This study aims to determine the influence of local government characteristics on the financial performance of district/city governments in West Kalimantan Province. The population with this study is the district/city government in West Kalimantan Province which has 2 (two) cities and 12 (twelve) districts. Information on the realization of funds that can be observed is in 2017-2021 or for five years, finally the total population in this study is 70. The technique of determining the sample with this study is saturated sampling. Therefore, the joint sample of this study is all populations as many as 70 reports of fund realization in districts/cities in West Kalimantan Province. This study data was collected together with documentation methods and literature studies which were then processed with multiple linear regression analysis tests with the help of SPSS 25. The results of the study convey that the level of regional wealth and capital expenditure has a constructive impact relevant to the financial performance of local governments, depreciation capacity in the central government has a negative impact relevant to the financial performance of local governments, but regional status does not have an impact on the financial performance of local governments. Meanwhile, the characteristics of local governments simultaneously affect the financial performance of local governments.

Keywords: *financial performance, level of wealth, level of dependence on central government, capital expenditure, regional status*

ABSTRAK

Studi ini bertujuan agar mengetahui pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja finansial pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Populasi bersama studi ini ialah pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat yang terdapat 2 (dua) kota dan 12 (dua belas) kabupaten. Informasi realisasi dana yang bisa diamati ialah pada tahun 2017-2021 atau selama lima tahun, akhirnya total populasi pada studi ini sebesar 70. Teknik penetapan sampel bersama studi ini yaitu sampling jenuh. Maka dari itu, sampel bersama studi ini yaitu semua populasi sebanyak 70 pemberitaan realisasi dana pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Data studi ini dikumpulkan bersama metode dokumentasi dan studi kepustakaan yang seterusnya diolah bersama uji analisis regresi linier berganda bersama

bantuan SPSS 25. Hasil studi menyampaikan yakni tingkat kekayaan daerah serta belanja modal berdampak konstruktif relevan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, kapasitas dependensi pada pemerintah pusat berdampak negatif relevan terhadap kinerja finansial pemerintah daerah, namun status daerah tidak berdampak terhadap kinerja finansial pemerintah daerah. Sementara itu, karakteristik pemerintah daerah berpengaruh secara simultan terhadap kinerja finansial pemerintah daerah.

Kata-kata Kunci: kinerja keuangan, tingkat kekayaan, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, belanja modal, status daerah

PENDAHULUAN

Pulau Kalimantan ialah salah satu pulau terluas di Indonesia yang mempunyai karakteristik eksklusif. Pulau ini ialah bagian dari tiga negara, yakni Indonesia, Malaysia, bersama Brunei Darussalam. Kondisi geografisnya memberikan kesempatan bagi Provinsi Kalimantan untuk menumbuhkan ekonominya sebab berdekatan bersama dua negara yang memiliki kondisi ekonomi yang stabil. Demi percepatan pembangunan wilayah, pada 25 Oktober 2012, Provinsi Kalimantan dimekarkan bersama pembentukan Provinsi Kalimantan Utara yang berbatasan langsung bersama Sabah serta Serawak. Artinya, Provinsi Kalimantan terbagi menjadi lima wilayah, ialah Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, serta Kalimantan Utara (Zulkifli, 2023). Kalimantan Barat (Kalbar) yakni salah satu wilayah di Indonesia yang menyimpan independensi daerah. Dimana independensi daerah di Kalbar telah mengacu pada UU Nomor 23 Tahun 2014 terkait Pemda.

Sebagai Provinsi menganut otonom daerah, Kalimantan Barat memiliki wewenangan yang lebih luas dalam mengatur dan mengurus urusan di kapasitas lokal. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bertanggung jawab menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayahnya. independensi daerah Kalimantan Barat memberikan kebebasan kepada pemerintah provinsi dalam merumuskan kebijakan dan peraturan daerah berdasarkan dengan kebutuhan dan karakteristik setiap daerah. Ini termasuk pengelolaan sumber daya alam, pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pariwisata dan lingkungan. Selain pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota di Kalbar juga memiliki kewenangan lebih besar dalam urusan regulasi dan administrasi di kapasitas daerah. Mereka bertanggung jawab atas pembangunan dan pelayanan publik di bidangnya masing-masing dengan acuan dari kebijakan dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi dan pusat (Fahmi *et al.*, 2023).

Dalam mengelola daerahnya, pemerintah mempunyai kewajiban salah satunya yaitu mengelola keuangan daerah. Dasar pengelolaan yaitu dengan APBD). Penyusunan laporan keuangan dan juga penyajian laporan keuangan merupakan bentuk

pertanggungjawaban APBD dalam bentuk transparansi pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya, dan ini tertuang bersama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kinerja keuangan termasuk bagian indikator yang menunjukkan kemampuan suatu entitas pemerintahan daerah dalam mewujudkan independensi daerah. Penyajian analisis finansial sebagai bagian dari bentuk pertanggungjawaban tercatat atas kinerja finansial yang sudah diperoleh dengan melihat penyajian laporan finansial (Mahmudi, 2019) menyelusuri informasi yang diungkapkan pada laporan keuangan, pihak yang berkewajiban mampu mengungkapkan sejauh mana kinerja keuangan pemda.

Menilai kinerja finansial penguasa daerah memerlukan perhatian pada karakteristik dari pemda itu sendiri (Sumarjo, 2010). Karakteristik penguasa daerah mencakup identitas yang membedakan setiap pemda dengan daerah lainnya (Annisa dkk., 2020). Adapun bentuk ciri penguasa daerah meliputi level kemakmuran, dependensi, belanja modal, dan status daerah. kapasitas kemakmuran daerah dapat diukur dari banyaknya Penerimaan Asli Daerah (PAD) yang dipunyai suatu daerah. PAD bermuasal dari pajak daerah, pungutan daerah, tata kemakmuran daerah yang dipisahkan, bersama PAD lainnya yang sah.

Hal ini dikarenakan setiap daerah memperoleh kapasitas dan karakteristik yang beragam sehingga besarnya PAD yang diperoleh juga berbeda-beda. Berikut ini tabel yang menunjukkan besarnya PAD di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2017-2021.

Tabel 1. PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2017-2021 (dalam ribu Rupiah)

Kabupaten	2017	2018	2019	2020	2021
Bengkayang	45,592.83	50,525.05	51,957.36	54,405.43	62,813.12
Landak	124,368.52	78,978.74	92,870.33	104,639.96	97,868.93
Kapuas Hulu	131,221.20	76,001.25	79,977.09	79,165.08	78,657.17
Ketapang	168,043.33	190,356.71	195,238.36	231,284.29	291,004.27
Mempawah	71,799.03	75,774.09	87,577.54	98,615.21	96,153.93
Sambas	200,322.60	127,663.39	148,846.28	129,676.50	148,139.10
Sanggau	151,917.75	117,497.97	117,494.36	117,923.98	129,732.90
Sintang	113,170.51	240,581.94	172,175.98	134,829.36	176,520.34
Sekadau	72,775.85	59,087.97	45,360.93	46,978.87	45,142.19
Melawi	67,202.76	4,088.66	40,577.16	30,872.00	56,170.12
Kayong Utara	36,486.22	27,205.10	28,597.87	39,525.27	34,406.95
Kubu Raya	152,023.13	184,531.27	172,839.46	39,528.27	160,894.59
Kota	2017	2018	2019	2020	2021
Kota Pontianak	476,050.41	440,358.12	478,790.89	403,176.70	413,401.93
Kota Singkawang	132,099.42	130,864.90	166,200.44	154,272.91	175,464.90

Sumber: BPS (PAD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017-2021

Bersumber tabel diatas dijelaskan bahwa setiap tahunnya PAD mengalami fluktuasi. Tingginya PAD yang diperoleh, maka kinerja finansial pemda akan kian bagus juga bersama membelanjakan berbagai aktivitas pengembangan bagi kesejahteraan masyarakat di lingkungan itu (Suandani & Astawa, 2021).

Menurut Penelitian (Sumarjo, 2010) pemerintah daerah menyampaikan tingkat dependensi terhadap penguasa pusat menyelusuri harapan mereka terhadap dana proporsi dalam menjalankan pemerintahan. Dependensi terhadap penguasa pusat diukur bersama membandingkan total dana proporsi bersama total pendapatan. Pada Provinsi Kalimantan Barat tahun 2017-2021, kapasitas dependensi penguasa daerah terhadap penguasa pusat memiliki pada umumnya persentase yang termasuk lumayan sebesar yakni 74,09%. Persentase dana proporsi menunjukkan ketidakmandirian penguasa daerah dalam membiayai program-program atau kegiatannya. Maka dari itu, bisa disimpulkan ialah penguasa di Provinsi Kalimantan Barat memiliki kualitas dependensi yang besar terhadap penguasa pusat.

Belanja modal ialah dana yang diperbelikan bersama meraih substansi tetap serta substansi lain yang bermanfaat semasa kian dari satu masa contohnya belanja modal untuk perolehanan sebuah tanah, bangunan dan fasilitas. Di rata-ratakan belanja modal pada di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2017-2021 hanya sebesar 22,68% dari total realisasi belanja. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson mengaku, pembangunan infrastruktur belum merata di semua wilayah (Insidepontianak.com, 2022). Pelayanan pada masyarakat akan mengalami peningkatan jika pengembangan yang dijalankan mengalami peningkatan akhirnya kinerja daerah tersebut menjadi kian bagus (Mappiasse, 2018).

Pasal 18B ayat (1) dari Undang-Undang Dasar (UUD) RI Tahun 1945 menegaskan ialah negara meyakini serta mematuhi bagian kekuasaan daerah yang memiliki karakteristik special atau status distingtif sesuai bersama ketentuan undang-undang. Persepsi bahwa jenis daerah berpengaruh pada tingkat keterbukaan informasi karena perbedaan dalam ciri masyarakat serta struktur pendapatan juga berdampak pada kontrol sosial yang beragam. Hal ini mengindikasikan bahwa status daerah bisa menentukan perbedaan antara kota serta kabupaten. (Rosadi *et al.*, 2017).

Menurut Suryaningsih & Sisdyani (2016) status daerah berpengaruh terhadap kelengkapan dalam menyampaikan sebab adanya ragam ciri masyarakat dan struktur pemasukan yang bisa berpengaruh terhadap kontrol sosial pada penduduk kota. Secara administratif, Provinsi di Kalimantan Barat mempunyai 14 (empat belas) kabupaten/kota yaitu dua kota dan dua belas kabupaten. Kinerja finansial bersama studi ini dihitung

memanfaatkan rasio independensi finansial. Rasio ini dijumlahkan bersama upaya menyandingkan total penerimaan PAD dibagi bersama total pendapat transfer yang diperoleh dari penguasa pusat serta provinsi bersama pinjaman daerah (Mahmudi, 2019).

Tabel 2. Rasio Kemandirian Kabupaten/Kota (Persen) di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017-2021

Kabupaten	2017	2018	2019	2020	2021
Bengkayang	4,92%	6,20%	6,05%	7,27%	6,7%
Landak	12,65%	8,13%	9,46%	11,09%	8,5%
Kapuas Hulu	10,11%	5,84%	5,75%	6,66%	4,8%
Ketapang	10,81%	12,09%	11,44%	15,03%	13,0%
Mempawah	9,11%	9,47%	11,15%	14,25%	10,9%
Sambas	15,38%	9,48%	10,68%	10,21%	9,4%
Sanggau	12,86%	10,01%	9,55%	11,40%	9,0%
Sintang	8,06%	18,43%	13,12%	11,29%	10,2%
Sekadau	11,02%	8,72%	6,90%	7,82%	5,7%
Melawi	7,12%	5,02%	4,57%	4,32%	5,5%
Kayong Utara	5,34%	4,27%	4,47%	6,77%	4,3%
Kubu Raya	14,43%	16,18%	15,93%	15,65%	12,3%
Kota	2017	2018	2019	2020	2021
Kota Pontianak	52,56%	46,72%	50,66%	46,41%	37,9%
Kota Singkawang	22,07%	21,27%	25,01%	26,81%	26,0%

Sumber: BPS Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017-2021

Di lihat dari table diatas rasio independensi finansial daerah kabupaten Bengkayang tahun 2017 sebanyak 4,92%, tahun 2018 total 6,20%, tahun 2019 total 6,05%, tahun 2020 total 7,27% serta tahun 2021 sebanyak 6,7%. Rasio independensi keuangan daerah kabupaten Landak tahun 2017 sebanyak 12,65% tahun 2018 sebanyak 8,13%, tahun 2019 sebanyak 9,46%, tahun 2020 sebanyak 11,09%, serta tahun 2021 sebanyak 8,5%. Rasio independensi keuangan daerah kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017 sebanyak 10,11% tahun 2018 sebanyak 5,84%, tahun 2019 sebanyak 5,75%, tahun 2020 sebanyak 6,66%, dan tahun 2021 sebanyak 4,8%. Rasio independensi keuangan daerah kabupaten Ketapang tahun 2017 sebanyak 10,81%, tahun 2018 sebanyak 12,09%, tahun 2019 sebanyak 11,44%, tahun 2020 sebanyak 15,03%, dan tahun 2021 sebanyak 13,0%. Rasio independensi keuangan daerah kabupaten Mempawah tahun 2017 sebanyak 9,11%, tahun 2018 sebanyak 9,47%, tahun 2019 sebanyak 11,15%, tahun 2020 sebanyak 14,25%, dan tahun 2021 sebanyak 10,09%. Rasio independensi keuangan daerah kabupaten Sambas tahun 2017 sebanyak 15,38%, tahun 2018 sebanyak 9,48%, tahun 2019 sebanyak 10,68%, tahun 2020 sebanyak 10,21%, dan tahun 2021 sebanyak 9,4%.

Rasio independensi keuangan daerah kabupaten Sanggau tahun 2017 sebanyak 12,86%, tahun 2018 sebanyak 10,01%, tahun 2019 sebanyak 9,55%, tahun 2020 sebanyak 11,40%, dan tahun 2021 sebanyak 9,0%. Rasio independensi keuangan daerah kabupaten Sekadau tahun 2017 sebanyak 11,02%, tahun 2018 sejumlah 8,72%, tahun 2019 sejumlah 6,90%, tahun 2020 sejumlah 7,82%, serta tahun 2021 total 5,7%. Rasio independensi keuangan daerah kabupaten Melawi tahun 2017 sebanyak 7,12%, tahun 2018 sebanyak 5,02%, tahun 2019 sebanyak 4,57%, tahun 2020 sebanyak 4,23%, dan tahun 2021 sebanyak 5,5%. Rasio independensi keuangan daerah kabupaten Kayong Utara tahun 2017 sebanyak 5,34%, tahun 2018 sebanyak 4,27%, tahun 2019 sebanyak 4,47%, tahun 2020 sebanyak 6,77%, dan tahun 2021 sebanyak 4,3%. Rasio independensi keuangan daerah kabupaten Kubu Raya tahun 2017 sebanyak 14,43%, tahun 2018 sebanyak 16,18%, tahun 2019 sebanyak 15,93%, tahun 2020 sebanyak 15,65%, dan tahun 2021 sebanyak 12,3%. Sedangkan rasio independensi keuangan daerah Kota Pontianak tahun 2017 sebanyak 52,56%, tahun 2018 sebanyak 46,72%, tahun 2019 sebanyak 50,66%, tahun 2020 sebanyak 46,41%, dan tahun 2021 sebanyak 37,9%. Dan rasio independensi keuangan daerah Kota Singkawang tahun 2017 sebanyak 22,07%, tahun 2018 sebanyak 21,27%, tahun 2019 sebanyak 25,01%, tahun 2020 sebanyak 26,81%, serta tahun 2021 sebanyak 26,0%

Dari hasil ini diyakini bahwa persentase keadaan rasio independensi penguasa kota lebih besar dari pada penguasa kabupaten. Persentase rasio independensi keuangan daerah tertinggi diperoleh Kota Pontianak. Hal ini dikarenakan besarnya PAD yang diperoleh Kota Pontianak juga menduduki posisi tertinggi yang berarti Kota Pontianak sudah baik dalam mengeksplorasi potensi PAD-nya. Sedangkan persentase rasio independensi keuangan daerah terendah diperoleh Kabupaten Kayong Utara. Hal ini juga dikarenakan besarnya PAD yang diperoleh Kabupaten Kayong Utara menduduki posisi terendah yang berarti Kabupaten Kayong Utara masih kurang baik dalam mengeksplorasi potensi PAD-nya. Hal tersebut juga dikarenakan Kabupaten Kayong Utara kabupaten termuda di Kalimantan Barat sehingga masih memerlukan bimbingan dalam mengelola pemerintahannya.

Bersumber uraian diatas dijalankan studi bersama judul "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Kalimantan Barat" dimana karakteristik dilihat dari kapasitas kekayaan daerah, tingkat dependensi pada pemerintah pusat, belanja modal, dan status daerah.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Kekayaan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kekayaan daerah ialah seruruh Barang yang dibeli atau diperoleh atas biaya taksiran pemasukan serta biaya daerah atau dihasilkan yang lain yang sah selaras bersama kaidah perundang-undangan yang aktif (Aziz & Kusumawati, 2024). Di sisi lain, efisiensi keuangan pemerintah daerah mengacu pada hasil yang telah dicapai organisasi selama periode waktu tertentu. Kinerja suatu organisasi harus diukur. Perhitungan kinerja menyampaikan umpan balik untuk perbaikan berkesinambungan guna meraih tujuan di masa depan (Insani *et al*, 2023).

Bersumber pada studi yang dijalankan oleh Armaja *et al* (2017) dalam penelitiannya menyampaikan yakni kemakmuran daerah, anggaran proporsi, serta belanja daerah baik selaku beriringan atau secara terisolasi berdampak terhadap kinerja finansial kabupaten/kota di Aceh. Bersumber pada studi yang dijalankan oleh Dasmal *et al* (2020) menyampaikan bahwa dari analisis regresi berganda yang dilakukan menyampaikan yakni kemakmuran daerah serta pemasukan antar penguasa berdampak relevan terhadap kinerja penguasa daerah, namun belanja daerah serta adanya audit bukan berdampak relevan terhadap kinerja penguasa daerah. Studi mempunyai dampak yang relevan terhadap kinerja penguasa daerah. yang bisa menumbuhkan kinerjanya menyelusuri kenaikan kemakmuran daerah bersama mengeksplorasi kapasitas daerah. Dari penelitian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kemakmuran daerah berdampak konstruktif, karena daerah dengan kapasitas kesejahteraan daerah yang lebih tinggi akan lebih bersedia mengungkapkan dan melihat informasi keuangan di situs resmi penguasa daerahnya. Berdasarkan penjabaran di atas, peneliti menyimpulkan yakni hipotesis studi ini adalah yakni:

H1 : Tingkat Kekayaan Daerah Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Ketergantungan Pada Pemerintah Pusat Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Dependensi mengacu pada situasi di mana kehidupan ekonomi tertentu terganggu oleh perkembangan dan perluasan kehidupan ekonomi lainnya. Saling dependensi merupakan suatu sikap saling membutuhkan antar manusia. Manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa berinteraksi bersama orang lain (Aulia & Rahmawaty, 2020). Di sisi lain, kinerja keuangan penguasa daerah mengacu pada kemampuannya dalam mengeksplorasi serta manajemen sumber daya finansial alam daerah untuk mencukupi keperluan pelayanan daerah dan mendukung sistem kekuasaan dan pembangunan

daerah tanpa dependensi sepenuhnya pada penguasa pusat. Silakan gunakan dana tersebut sesuai dengan ketentuan hukum (Setiani, 2022). Bersumber pada studi yang dijalankan oleh Setiani (2022) menyampaikan bahwa hasil studi menyampaikan yakni dependensi berdampak terhadap kinerja finansial penguasa daerah, selanjutnya ekspansi ekonomi serta kemiskinan bukan berdampak terhadap kinerja finansial penguasa daerah. Bersumber pada studi yang dijalankan oleh (Srimulyani *et al.*, 2021) yang menyampaikan kapasitas dependensi pada pusat memicu kinerja finansial penguasa daerah secara relevan

Dari penjabaran diatas peneliti menyimpulkan bahwa kian banyak uang kompensasi dari penguasa pusat ke penguasa daerah, jadi kian besar dependensi penguasa daerah terhadap penguasa pusat, serta kian sedikit upaya penguasa daerah agar menumbuhkan pemasukan daerah. Maka dari itu peneliti menyimpulkan bahwa hipotesis bersama studi ini yakni:

H2 : Tingkat Ketergantungan Pada Pemerintah Pusat Berpengaruh Relevan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Belanja modal merujuk pada pengeluaran anggaran agar memperoleh substansi tetap serta substansi lain yang menyampaikan perannya semasa kian dari satu masa akuntansi. Hal ini mencakup perolehan peralatan, tanah, bangunan, gedung, serta aset tak berwujud (Simamora & Budiwitjaksono, 2022). Kinerja finansial penguasa daerah mencerminkan kapasitas pencapaian dalam mengelola finansial agar melaksanakan aksi kewenangan demi menumbuhkan sasaran, tujuan, visi, serta misi penguasa (Srimulyani *et al.*, 2021).

Bersumber pada penelitian yang dijalankan oleh (Niswani & Firdaus, 2022). Hasil studi menyampaikan yakin secara parsial belanja modal berdampak konstruktif serta relevan terhadap kinerja keuangan daerah, selanjutnya anggaran proporsi serta (PAD) tidak berdampak relevan terhadap kinerja finansial daerah. Bersumber pada studi yang dijalankan oleh (Sari *et al.*, 2014). Selaku parsial, belanja modal sert pemasukan asli daerah berdampak signifikan kepada kinerja finansial. Bersumber pada penelitian yang dijalankan oleh (Wahyudin, 2020). Menyampaikan yakni Pendapatan Asli Daerah, Dana proporsi, serta Belanja Modal sekaligus berdampak konstruktif serta relevan terhadap kinerja finansial penguasa kabupaten serta kota di Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2014-2018.

Bersumber pada penjabaran diatas peneliti menyimpulkan yakni belanja modal yang dijalankan oleh penguasa daerah mampu dianggap selaku bentuk investasi

penguasa daerah. Aktivitas pengeluaran modal ini dapat meningkatkan aset tetap yang dimiliki oleh daerah, serta diharapkan dapat memperoleh aset finansial bersama jangka panjang. Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas melahirkan ketepatan di berbagai sektor serta meningkatkan produktivitas masyarakat, sehingga kesejahteraan meningkat. Sementara itu, semakin banyaknya pengembangan yang dilakukan oleh penguasa juga mampu menaikkan pengembangan kinerja finansial penguasa daerah di masa mendatang. Berdasarkan pernyataan tersebut maka penulis menetapkan hipotesis dalam penelitian ini yakni:

H3 : Belanja Modal Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Status Daerah Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Status daerah ialah sebuah pengakuan nasional atas suatu daerah selaku kabupaten atau kota. Status daerah dihitung bersama pemberian skor, jika Kabupaten diberi skor 1 (satu) serta apabila status daerah ialah Kota diberi skor 2 (dua) (Juliana & Vivi Nur Aleyda, 2021). Bersumber pada studi yang dijalankan oleh (Lestari, 2019) menyampaikan yakni ragam penguasa daerah berpengaruh konstruktif terhadap kinerja finansial penguasa daerah kabupaten/kota di Sumatera Selatan individualitas penguasa daerah terdiri dari kemakmuran, dependensi pada pusat, status daerah, serta belanja modal menyelusuri independensi daerah serta desentralisasi, semua masyarakat dapat mengenali ragam serta kapabilitas yang ada di daerahnya. Bersama hal ini ciri-cirinya mampu diidentifikasi dari kemakmuran penguasa daerah, status daerah, dependensi terhadap penguasa pusat, belanja modal daerah, dan lain-lain. Bersumber pada penjabaran diatas peneliti menyimpulkan bahwa hipotesis bersama studi ini yakni :

H4 : Status Daerah Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Ciri-ciri penguasa daerah merupakan ciri-ciri penguasa daerah yang mempunyai ragam khas suatu daerah serta membedakannya dengan daerah lain (Bantari, 2022) Kinerja finansial penguasa daerah ialah derajat peraih hasil kerja sektor finansial daerah, termasuk pendapatan serta belanja daerah bersama memafaatka sistem fiskal yang ditetapkan oleh kewenangan atau ketetapan peraturan perundang-undangan selama waktu anggaran (Wahyudin, 2020). Bersumber pada penelitian yang dijalankan oleh (Nugroho, 2018) Menyampaikan yakni individualitas penguasa daerah berdampak konstruktif terhadap kinerja finansial penguasa daerah bersama memafaatkan indikator

pemasukan antar penguasa, belanja daerah, pemasukan asli daerah, serta belanja modal pada kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015 sampai bersama tahun 2017. Bersumber pada penelitian yang dijalankan oleh (Kusumasari, 2022). Menyampaikan bahwa ragam pemerintah daerah serta faktor audit berpengaruh konstruktif terhadap kinerja finansial pemerintah daerah. Bersumber pada penjabaran diatas peneliti menyimpulkan bahwa Di sektor publik, ragam daerah bisa menjadi indikator yang baik mengenai kinerja pemerintah daerah. Oleh karena itu, perbedaan ragam antar daerah diperkirakan akan mempengaruhi kinerja finansial pemerintah daerah. Maka dari itu penyimpulan hipotesis bersama studi ini yakni:

H5 : Karakteristik Pemerintah Daerah Berpengaruh Relevan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

METODOLOGI PENELITIAN

Studi asosiatif / kuantitatif merupakan studi yang bertujuan agar meyakini ikatan antara dua variabel atau lebih. Jenis data yang dimanfaatkan bersama studi ini ialah data sekunder yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2017-2021. Selain itu, data sekunder lainnya adalah hasil-hasil studi serta buku-buku literatur untuk memperoleh hasil argumentasi yang akan mendukung analisis yang diperoleh. Bentuk studi ini dimanfaatkan pada studi ini ialah asosiatif bersama pendekatan kuantitatif.

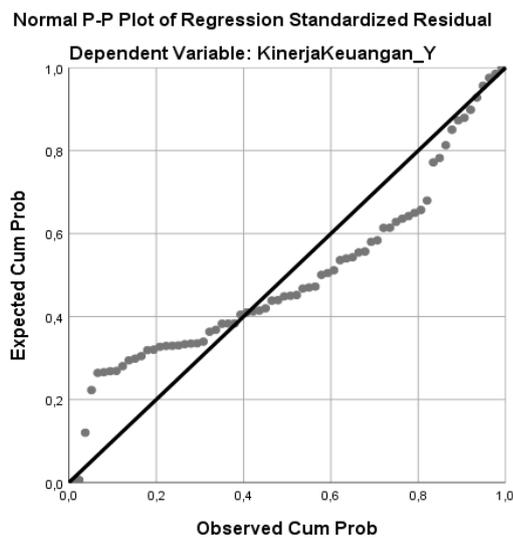
Bersama memanfaatkan data yang berasal dari LRA atau Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Variable yang dimanfaatkan pada studi ini ada dua, yakni variable independen (bebas) serta variabel dependen (terikat). Variable independen (bebas) pada studi ini yang diukur dengan kualitas kemakmuran daerah yang diukur dari besarnya (PAD), Kualitas dependensi pada pemerintah pusat, belanja modal serta status daerah untuk variabel dependen (terikat) yaitu kinerja finansial.

Data ini dikumpulkan dengan menggunakan penelitian kepustakaan dan dokumentasi Penelitian kepustakaan dilakukan menyelusuri pengolahan literatur, jurnal-jurnal, artikel, dan media tertulis lainnya yang berhubungan bersama topik yang dibahas dalam studi ini Selanjutnya dokumentasi dijalankan bersama mengumpulkan sumber data dokumen seperti laporan finansial tahunan perseroan yang diamati Populasi studi ini ialah pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Barat yang terdiri dari dua kota serta 12 kabupaten Karena laporan pelaksanaan anggaran yang diteliti ialah tahun 2017 sampai bersama tahun 2021 atau 5 tahun, maka jumlah populasi studi ini meliputi laporan pelaksanaan dana kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat

sebanyak 70 orang. Teknik pengambilan sampel bersama studi ini yaitu sampling jenuh. Maka dari itu, sampel yang dimanfaatkan bersama studi ini yakni semua populasi sebanyak 70 laporan realisasi dana pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat.

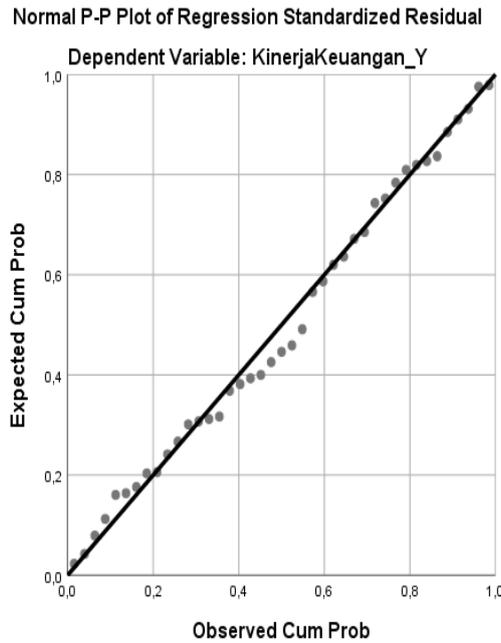
HASIL PENELITIAN

Uji Asumsi Klasik



Gambar 1. Grafik Normal P-Plot

Berdasarkan hasil uji normalitas yang memanfaatkan grafik Normal P-Plot dapat dilihat data tersebut ada kemungkinan tidak terdistribusi dengan normal, untuk menormalkan data maka perlu dilakukan perbaikan dengan cara ditreatmen yaitu penghapusan data outlier. Untuk menormalkan data maka perlu melakukan perbaikan dengan ditreatmen yaitu penghapusan data outlier. Selanjutnya hasil uji normalitas bersama memanfaatkan grafik Normal P-Plot sesudah dilakukan pengeliminasian data outlier yakni:



Gambar 2. Grafik Normal P-Plot

Untuk lebih menyakinkan hasil dari uji normalitas maka dilakukan uji selanjutnya yaitu dengan metode *kolmogorov-smirnov test*. Selanjutnya hasil uji normalitas bersama memanfaatkan uji *kolmogorov-smirnov test*. Angka Asymp. Sig. (2-tailed) sejumlah 0,200 yang diperoleh dari hasil uji normalitas yang memanfaatkan *kolmogorov-smirnov test* menyampaikan yakni angka tersebut $> \alpha = 0,05$. Selanjutnya mampu disampaikan yakni data diatas berdistribusi normal serta model regresinya baik berdasarkan uji normalitas memanfaatkan *kolmogorov-smirnov test*.

Tabel 3. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		41
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,00120703
Most Extreme Differences	Absolute	,080
	Positive	,080
	Negative	-,050
Test Statistic		,080
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

Sumber : Data diolah SPSS, 2023

Hasil tabel 4 dilihat dari Asymp. sig menggunakan *run test* yaitu 0,997 yang berarti nilai tersebut $> 0,05$ selanjutnya mampu disampaikan yakni pada model regresi ini bukan merupakan problem autokorelasi. Hasil analisis uji multikolinearitas pada tabel 5 menunjukkan bahwa Kekayaan memiliki *collinearity tolerance* 0,431 $> 0,10$ serta

angka VIF 2,318 < 10. jumlah *collinearity tolerance* dependensi 0,884 > 0,10 bersama jumlah VIF 1,132 < 10. jumlah *collinearity tolerance* capital expenditure 0,861 > 0,10 bersama jumlah VIF 1,161 < 10. Serta jumlah *collinearity tolerance* Status daerah 0,398 > 0,10 bersama angka VIF 2,511 < 10. Sehingga jumlah *tolerance* dan VIF dimaknai yakni tidak adanya masalah multikolinearitas dari tiap-tiap variabel bebas.

Tabel 4. Uji Autokorelasi

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-,00017
Cases < Test Value	20
Cases >= Test Value	21
Total Cases	41
Number of Runs	22
Z	,004
Asymp. Sig. (2-tailed)	,997

a. Median

Tabel 5. Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Kekayaan_X1	,431	2,318
Ketergantungan_X2	,884	1,132
BelanjaModal_X3	,861	1,161
StatusDaerah_X4	,398	2,511

a. Dependent Variable: KinerjaKeuangan_Y

Sumber: Data diolah SPSS, 2023

Tabel 6. Uji Heteroskedastisitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Kekayaan_X1	,431	2,318
Ketergantungan_X2	,884	1,132
BelanjaModal_X3	,861	1,161
StatusDaerah_X4	,398	2,511

a. Dependent Variable: KinerjaKeuangan_Y

Sumber : Data diolah SPSS, 2023

Hasil dari tabel 6 diperoleh angka relevan pada variabel Kekayaan sebanyak 0,549 > 0,05. Angka relevan variabel dependensi sebanyak 0,416 > 0,05. Angka relevan variabel Belanja Modal sebanyak 0,825 > 0,05. Selanjutnya variabel Status Daerah bersama angka relevan 0,721 > 0,05. Hal ini menyampaikan tidak terdapat heterokedastisitas agar variabel Kekayaan, dependensi, Belanja Modal dan Status Daerah pada model regresi ini.

Uji Hipotesis

Tabel 7. Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,100	,004		27,599	,000
Kekayaan_X1	1,336	,010	,936	140,366	,000
Ketertanggung_X2	-,142	,005	-,145	-31,060	,000
BelanjaModal_X3	,008	,004	,009	1,860	,071
StatusDaerah_X4	,005	,001	,030	4,362	,000
Sig F	0,000				
Adjusted R Square	0,999				

a. Dependent Variable: KinerjaKeuangan_Y

Sumber : Data diolah SPSS, 2023

Tingkat kepercayaan yang dimanfaatkan yakni 5% atau $\alpha = 0,05$. Dari hasil penelitian diatas mampu diinterpretasikan sebagai berikut :

- (1) Variabel Kekayaan menghasilkan angka relevan $0,000 < 0,05$. Yang maknanya bahwa angka Kekayaan memiliki dampak terhadap Kinerja Keuangan, akhirnya mampu disampaikan yakni H1 diterima.
- (2) Variabel dependensi menghasilkan jumlah relevan $0,000 < 0,05$. Yang maknanya bahwa nilai dependensi memiliki pengaruh terhadap Kinerja finansial. akhirnya mampu disampaikan yakni H2 diterima
- (3) Variabel Belanja Modal menghasilkan nilai signifikansi $0,071 > 0,05$. Yang maknanya yakni nilai Belanja Modal tidak memiliki pengaruh terhadap Kinerja finansial. akhirnya mampu disampaikan yakni H3 ditolak.
- (4) Variabel Status Daerah menghasilkan angka relevan $0,000 < 0,05$. Yang maknanya bahwa angka Status Daerah memiliki berdampak terhadap Kinerja Keuangan. akhirnya mampu disampaikan bahwa H4 diterima.

Berdasar data di tabel 7 di atas diperoleh angka signifikansi $0,000 < 0,05$. Akhirnya mampu dimaknai yakni kekayaan, dependensi, *capital* expenditure dan status daerah mempunyai dampak yang simultan terhadap Kinerja finansial. Pengujian diatas didapat angka koefisien determinasi atau Adjusted R Square 0,999. Hal terkait bearti Kinerja finansial dipengaruhi oleh Kekayaan, dependensi, *capital* expenditure dan Status Daerah sebanyak 99,9% selebihnya 0,1% dipicu oleh variabel lain yang bukan dianalisa dipenelitian ini.

Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Bersumber paparan hasil, Diketahui yakni kapasitas kekayaan daerah mempunyai dampak konstruktif relevan terhadap kapasitas finansial pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Barat. Hal tersebut mampu diamati dari besarnya koefisien regresi variabel kapasitas kekayaan daerah yang bernilai konstruktif senilai 1,336 bersama relevan $0,00 > 0,05$. studi menyampaikan kian tinggi kapasitas kekayaan daerah, jadi meningkat pula kinerja finansial pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Barat. Peningkatan kapasitas kekayaan daerah dapat dipengaruhi oleh pekebangan ekonomi yang bisa didorong oleh investasi yang juga akan didorong oleh penaikan perbaikan infrastruktur sehingga kualitas pelayanan publik dapat ditingkatkan.

Selain itu peningkatan kapasitas kekayaan daerah juga berpengaruh langsung terhadap besarnya PAD yang kemudian akan berpengaruh terhadap total pendapatan, sehingga berpengaruh terhadap independensi finansial pemerintah daerah. Hasil studi ini memiliki hasil yang sama bersama studi Hertinawati (2021), (Kusuma, n.d.) serta (Nugroho, 2018) mengungkapkan bahwa menunjukkan hasil kapasitas kekayaan daerah pengaruh relevan terhadap kinerja pemerintah daerah. Namun, hasil studi ini bertolak belakang bersama hasil yang dijalankan Marfiana & Kurniasih (2013) mengungkapkan yakni kekayaan pemerintah daerah bukan mempunyai dampak terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Tingkat Ketergantungan Pada Pemerintah Pusat Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Bersumber hasil studi, diketahui yakni tingkat dependensi pada pemerintah pusat berdampak negatif relevan terhadap kinerja finansial pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Hal tersebut mampu dibuktikan dari besarnya koefisien regresi variabel kapasitas dependensi pada pemerintah pusat yang bernilai negatif sejumlah 0,142 bersama angka relevan $0,00 > 0,05$. Hal ini menyampaikan semakin besar tingkat dependensi pada pemerintah pusat, maka kian menurun kinerja finansial pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat.

Pandangan Suryaningsih & Sisdyani (2016) semakin tinggi transferanggaran proporsi yang diperoleh dari pemerintah pusat menyampaikan kian kuat pemerintah daerah, maka semakin terhubung pada pemerintah pusat agar mencukupi keperluan daerahnya, semakin kecil kemungkinan pemerintah daerah meningkatkan PADnya, dan semakin menurunnya kinerja pemerintah daerah. Dana yang diperoleh dari pemerintah

pusat kian besar dipergunakan agar belanja yang bersifat rutin daripada *capital expenditure*. Hasil studi ini selaras bersama studi oleh (Kusuma, n.d.) serta Suryaningsih & Sisdyani (2016) mengungkapkan bahwa hasil studi menyampaikan kapasitas dependensi pada pemerintah pusat berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Namun, hasil studi ini bertolak belakang dengan studi Marfiana & Kurniasih (2013) menunjukkan tingkat dependensi pada pemerintah pusat mempunyai dampak yang konstruktif signifikan terhadap kinerja finansial pemerintah daerah.

Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Bersumber hasil studi, diketahui yakni *capital expenditure* bukan berdampak konstruktif terhadap kinerja finansial pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini dilihat dari besarnya koefisien regresi variabel *capital expenditure* bernilai konstruktif sebanyak 0,008 bersama angka relevan $0,71 > 0,05$. Hal ini menyampaikan yakni *capital expenditure* tidak memiliki dampak konstruktif terhadap kinerja finansial pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Barat. Hasil ini menyampaikan arti yakni aktivitas *capital expenditure* yang dilaksanakan pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Barat belum bisa menyampaikan kontribusi yang cukup terhadap ekspansi pemasukan daerah.

Pengaruh Status Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Bersumber hasil studi, diketahui yakni status daerah mempunyai dampak yang konstruktif terhadap kinerja finansial pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini dibuktikan dari besarnya koefisien regresi variabel status daerah yang bernilai konstruktif sebanyak 0,005 bersama jumlah sig $0,000 < 0,05$. Studi ini menyampaikan yakni status daerah berdampak terhadap kinerja finansial pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Barat. Studi ini menjelaskan yakni dana independensi daerah yang memerankan kedudukan mengatur dana kabupaten atau kota terkait dipengaruhi oleh status daerah, sehingga anggaran tersebut diawasi oleh masyarakat dengan tujuan transparansi atau keterbukaan dalam anggaran.

Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa karakteristik pemerintah daerah yang terdiri dari kapasitas kekayaan daerah, kapasitas dependensi pada pemerintah pusat, *capital expenditure*, serta status daerah secara simultan berdampak relevan

terhadap kinerja finansial pemerintah daerah. angka relevan $0,00 < 0,05$, maka H5 diterima. Studi ini menyampaikan kalau kapasitas kekayaan, kapasitas dependensi pada pemerintah pusat, *capital expenditure*, dan status daerah secara beriringan mempunyai dampak terhadap kinerja finansial pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Barat.

SIMPULAN

Bersumber hasil studi diatas mampu disampaikan yakni tingkat kekayaan daerah berdampak relevan terhadap kinerja finansial pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Studi ini terlihat dari kian tinggi kapasitas kekayaan daerah, maka menjelaskan bahwa kian meningkat kinerja finansial pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Barat. Tingkat dependensi pada pemerintah pusat berdampak konstruktif relevan terhadap kinerja finansial pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini menunjukkan kian tingginya total anggaran proporsi dari pemerintah pusat kepada daerah maka mencerminkan pula kian terkegantungannya penguasa daerah kepada pemerintah pusat akibatnya penguasa pemerintah daerah bukan akan melakukan upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah lagi. *Capital expenditure* bukan berdampak konstruktif terhadap kinerja finansial pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Barat. Hasil ini menyampaikan makna kalau kegiatan *capital expenditure* yang dilaksanakan pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Barat masih belum sepenuhnya bisa menyampaikan kontribusi terhadap ekspansi pemasukan daerah. Status daerah berdampak konstruktif relevan terhadap kinerja finansial pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini menyampaikan status daerah berdampak terhadap kinerja finansial pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Barat. Karakteristik pemerintah daerah berdampak relevan secara simultan terhadap kinerja finansial pemerintah daerah. Studi ini menyampaikan yakni kapasitas kekayaan, kapasitas dependensi pada pemerintah pusat, belanja modal, dan status daerah secara bersama-sama mempengaruhi kinerja finansial pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, A. N., Abdullah, M. I., Iqbal, M., & Yamin, N. Y. (2020). Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Ukuran Pemerintah Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah. *Jurnal Akun Nabelo: Jurnal Akuntansi Netral, Akuntabel, Objektif*, 2 (2), 242–260.
- Aulia, R., & Rahmawaty, R. (2020). Pengaruh Kemakmuran Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Dan Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5 (4), 584-598.

- Aziz, A. A., & Kusumawati, E. (2024). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan Pada Pusat, Pertumbuhan Ekonomi, dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4 (1), (6984–6995).
- Dasmar, T., Basri, Y. M., & Indrawati, N. (2020). Pengaruh Kekayaan Daerah, Belanja Daerah, Intergovernmental Revenue, Temuan Audit (BPK) Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Riau). *Jurnal Al-Iqtishad*, 16 (2), 39-57.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (n.d.). *Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan / Setelah TA 2006*. <https://djpk.kemenkeu.go.id/>.
- Fahmi, M., Ningrum, K. Y., Mariana, D., & Rivaldi, U. A. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemda Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat. *Eksos*, 19 (2), 151-162.
- Hertinawati. (2021). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Opini Output Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat)*. Politeknik Negeri Pontianak.
- Hidayah, Z., & Witono, B. (2021). Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019. *Seminar Nasional Kewirausahaan UMSU*, 2 (1), 217–228.
- Insani, A., Rahayu, S., & Erwati, M. (2023). Determinan kinerja keuangan pemerintah daerah. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 6 (1), 109–125.
- Insidepontianak.com. (2022, April 8). *Kerjar Target RPJMD, Pemprov Kalbar Fokus Bangun Jalan Tahun ini*. <https://www.insidepontianak.com/kalbar/pr-4543316207/kerjar-target-rpjmd-pemprov-kalbar-fokus-bangun-jalan-tahun- ini>.
- Juliana, E., & Vivi Nur Aleyda, dan. (2021). *Penerapan Metode Clustering K-Mens Untuk Membantu Mentukan Tingkatan Status Daerah Dampak Covid 19* (Vol. 12, Issue 1). <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/just-it/index>.
- Kholmi, M. (2010). Akuntabilitas Dalam Perspektif Teori Agensi. *Ekonomika- Bisnis*, 2 (2), 357–370.
- Kusuma, P. M., & Kurniasih, L. (n.d.). Pengaruh Opini Audit Dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota Di Indonesia. *In 51 Equity*, (Vol. 20, Issue 1).
- Kusumasari, K. R. (2022). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Faktor Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah). (*Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang*).
- Lestari, L. (2019). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan. *Skripsi*.

- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN.
- Marfiana, N., & Kurniasih, L. (2013). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. *Journal & Proceeding Universitas Jenderal Soedirman*, 3 (1), 1–16.
- Mappiasse, A. L. (2018). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan. *Bongaya Journal for Research in Accounting*, (Vol. 1).
- Nugroho, R. A. (2014). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah* [Skripsi, Universitas Diponegoro]. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/10285>.
- Nugroho, T. R. (2018). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten & Kota Di Jawa Timur. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 7 (1), 27. <https://doi.org/10.25273/jap.v7i1.1823>.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Pratama, M. Y. (2019, Mei 6). *Mengenal Dak dan Kebijakan Baru Dak Non Fisik 2019*. Kementerian Keuangan. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/mengenal-dak-dan-kebijakan-baru-dak-non-fisik-2019/>.
- Priyatno, D. (2018). *SPSS: Panduan Mudah Olah Data bagi Mahasiswa dan Umum*. Yogyakarta: ANDI.
- Profil Daerah. (n.d.). Diambil 20 Juni 2022, dari <https://ppid.kalbarprov.go.id/?public=profil-daerah>.
- Qowi, R., & Prabowo, T. J. W. (2017). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Pemeriksaan BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2012. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6 (1), 1–13.
- Rosadi, S., Siyamto, Y., & Aisyiah, H. N. (2017). Pengaruh ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, kelemahan sistem pengendalian internal, kepatuhan peraturan perundang-undangan, status daerah dan ukuran daerah terhadap opini laporan keuangan pemerintah daerah di pulau Jawa tahun 2013. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3 (02), 99–111.
- Sari, N., Rojeston, B., Nainggolan, M., Purba, R. A., Saragih, T. B., & Banjarnahor, W. (2014). *Partially, Capital Expenditures and Regional Original Revenue has a relevant impact on Financial Performance. While the Balancing Fund has no significant impact on Financial Performance in North Sumatra*. 2014–2017. www.bps.go.id.

- Setiani, I. (2022). Pengaruh Pengangguran Pertumbuhan Ekonomi Kemiskinan dan Tingkat Ketergantungan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jemba: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1 (3), 261-276.
- Siregar, M. I. C. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Propinsi Papua. *Jurnal Aplikasi Manajemen, Ekonomi dan Bisnis*, 5 (1), 26–42. <https://doi.org/10.51263/jameb.v5i1.111>.
- Suandani, K. P., & Astawa, I. G. P. B. (2021). Pengaruh Opini Audit, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2015-2019. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 12 (03), 728–739.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sumarjo, Hs. H. (2010). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (studi empiris pemerintah daerah Kabupaten/kota di Indonesia).
- Suryaningsih, N. M., & Sisdyani, E. A. (2016). Karakteristik Pemerintah Daerah dan Opini Audit Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15 (2), 1453–1481.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Wahyudin, I. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1), 86–97.
- Zulkifli, S. (2023). *Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat* (Doctoral dissertation, IPDN).